

Fungsi Pengawas Bidang SMP Dalam Melakukan Monitoring Terhadap Kualitas Pendidikan

Oleh:

¹Yohanis E. Teturan; ²Marce Fero Wakim; ³Hubertus Oja

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Musamus

E-mail: endesteturan@unmus.ac.id

Abstrak

Pengawasan yang berkualitas adalah pengawasan yang dilakukan pada semua sekolah dan membantu guru dan sekolah dalam hal peningkatan sistem belajar mengajar maupun pengelolaan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pengawasan pendidikan terhadap Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menemukan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke belum maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yakni pengawas sekolah yang tersedia di dinas tidak seimbang dengan jumlah sekolah yang ada sehingga berpengaruh terhadap jangkauan pengawas ke sekolah binaan menjadi berkurang dan tidak merata. Kunjungan pengawas lebih intens dilakukan pada sekolah yang ada di kota sedangkan sekolah yang berada di pinggiran dan pelosok kunjungan hanya dilakukan tiga bulan sekali bahkan terdapat sekolah yang sangat jarang dilakukan pengawasan. Padahal dengan kunjungan pengawas yang teratur dapat membantu sekolah dalam melihat kekurangan sekolah untuk segera diperbaiki. Hal lain yang membuat pelaksanaan pengawasan belum maksimal adalah karena kekurangan dana. Untuk melakukan pengawasan pada sekolah yang jauh, pengawas kadang menggunakan uang pribadi karena dana supervisi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Selain itu, kondisi geografis yang menantang juga membuat pengawas sulit mengunjungi sekolah.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan; Kualitas; Pendidikan

Abstract

Quality supervision is supervision that is carried out in all schools and assists teachers and schools in improving teaching and learning systems and school management. This study aims to describe the quality education supervision Regency to junior high schools in Merauke Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques, namely, data reduction, data display and data verification. The results of the study found that the implementation of supervision carried out by the Education and Culture Office of Merauke Regency was not optimal. This is due to the lack of human resources, namely the school supervisors available at the office are not balanced with the number of existing schools so that it affects the reach of supervisors to the target schools to be reduced and uneven. Superintendent visits were more intense at schools in the city, while schools located in suburbs and remote areas were only visited once every three months, and there were schools that were rarely supervised. Whereas with regular visits by supervisors, it can help schools to see school shortages to be repaired immediately. Another thing that has made the implementation of supervision less optimal is due to a lack of funds. To carry out supervision at schools that are far away, supervisors sometimes use personal money because the supervision funds provided by the government are insufficient. In addition, the challenging geographical conditions also make it difficult for supervisors to visit schools.

Keywords: Supervision Function; Quality; Education

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab 4 bagian ke-4 pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa dalam proses berjalannya pendidikan, pemerintah berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dengan dilakukannya pengawasan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Merauke 2017) pada tiga tahun terakhir ini Kabupaten Merauke memiliki 59 Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari sekolah negeri berjumlah 41 dan sekolah swasta berjumlah 18 sekolah. Sekolah-sekolah ini tersebar ke semua distrik yang ada di Kabupaten Merauke. Dari ke-59 sekolah yang tersebar di Kabupaten Merauke, belum semua sekolah merasakan dengan baik pengawasan dari Dinas Pendidikan. Pengawasan sangatlah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan karena dengan pengawasan kemampuan profesionalisme dari tenaga pendidik dan kepala sekolah serta staf sekolah dapat terus dibina dan dikembangkan serta dapat mengetahui tingkat perkembangan baik dari guru maupun dari siswa sendiri. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidaklah maksimal atau dapat dikatakan masih buruk. (Jeujan and Teturan 2014) Belum adanya program kerja yang jelas diterima baik langsung maupun tidak langsung ke sekolah. Sehingga segala aktivitas yang dilakukan hanya mengarah pada pikirannya sendiri-sendiri yang tidak melalui perencanaan yang baik.

Dedi Iskandar (2016) Pendapat Alaracao ini kemudian dipertegas lagi oleh Bar (Sullivan & Glanz, 2005:) (dalam Dedi Iskandar, 2016) tentang kemampuan pengawas dalam bidang pendidikan yaitu: Pengawas harus memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi pengajaran dan untuk menemukan penyebab kemungkinan pekerjaan yang buruk dengan tingkat keahlian, keterampilan konstruktif tertentu untuk pengembangan sarana baru, metode dan bahan-bahan pengajaran. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak secara merata di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Merauke. Pengawas lebih sering mengunjungi sekolah-sekolah yang berada di dalam kota, sedangkan sekolah yang di luar kota jarang di kunjungi oleh para pengawas hal ini tentu menjadi per masalah utama dalam pelaksanaan pengawasan. Fungsi pengawas memiliki peran untuk menjamin mutu pendidikan sekolah, sekolah yang ada di dalam kota maupun di luar kota sama-sama membutuhkan adanya pembimbing atau ada yang mengarahkan mereka tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Jika pengawas melakukan pengasawasan dengan baik terhadap sekolah-sekolah yang ada, maka hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Karena guru perlu dibina dan dinilai untuk mengembangkan kemampuannya sehingga peningkatan mutu pembelajaran pada khususnya dan membantu sekolah pada umumnya untuk menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, jika guru sudah

berkualitas maka peluang untuk prestasi siswa juga akan lebih baik.

Pengawasan memiliki banyak istilah, diantaranya: *monitoring, correcting, evaluation, dan supervision*. Pengawasan memiliki arti yang banyak, seperti terus menerus/kontinu, memberikan penjelasan dan petunjuk, pembinaan serta pelurusan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengawasan sangatlah berperan penting dalam sebuah organisasi. Sudjana, et al (2006:8) (Dedi Iskandar, 2016) mengemukakan terdapat 4 dimensi pengawasan. Keempat dimensi tersebut antara lain: 1) *Support*. Dimensi ini menunjuk pada pengawasan yang dilakukan oleh supervisor dalam mendukung (*support*) pihak sekolah guna mengevaluasi diri dalam kondisi sebenarnya. Jadi, untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan sekolah masa kini dan masa mendatang, pihak sekolah dan supervisor dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. 2) *Trust*. Pada dimensi ini, pengawas/supervisor memberikan kepercayaan stakeholder pendidikan dengan menggambarkan profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik. 3) *Challenge*. Pada dimensi ini, supervisor memberikan tantangan pengembangan sekolah terhadap stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan yang diberikan harus realistis berdasarkan situasi dan kondisi sekolah guna membuat stakeholder merasa tertantang untuk bekerja sama secara kolaboratif untuk pengembangan mutu sekolah. *Networking dan collaboration*. Artinya bahwa supervisor membangun atau mengembangkan jejaring serta berkolaborasi antar stakeholder pendidikan serta komponen-komponen pendidikan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana data penelitian akan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono 2014). Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke dengan objek penelitian ada pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Waktu Penelitian untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan maka penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan saat melakukan penelitian. *Indepth interview* atau wawancara dengan informan utama merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi dalam bentuk dokumen, arsip-arsip, publikasi serta artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data secara umum terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan terdiri dari kepala dinas, kepala bidang SMP, 5 orang pengawas dan 6 orang kepala sekolah. Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil lapangan, wawancara, dokumentasi. (Sugiyono 2012), Miles dan Huberman (Sugiyono 2012) menyatakan bahwa terdapat 3 langkah dalam menganalisis sebuah data, yakni: Reduksi data berarti

merangkum, Display Data Setelah peneliti mereduksi data, Verifikasi data langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Monitoring

Monitoring atau pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus guna untuk mengetahui apakah kegiatan atau objek yang dimonitoring tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Monitoring yang dilakukan oleh pengawas pada SMP berarti pengawas melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan sekolah. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas maupun manajemen sekolah ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi indikator yang dijadikan pertanyaan mengenai monitoring adalah: pelaksanaan monitoring pada SMP dan pandangan terhadap monitoring yang sudah dilakukan terhadap mutu pendidikan.

Untuk monitoring yang selama ini kami lakukan ada 3 cara. (1) laporan bulanan, (2) turun langsung ke sekolah, (3) bekerja sama dengan pengawas. Untuk laporan bulanan, sekolah melaporkan sekolahnya, tendiknya, sarprasnya, dan proses pembelajaran tiap bulan sebagai bahan evaluasi. Sedangkan kalau turun langsung ke sekolah, kami lakukan setahun sekali. Saat kami turun, yang kami lihat adalah siswanya, gurunya, sarprasnya. Sedangkan untuk yang bekerja dengan pengawas, mereka memonitoring baik gurunya, siswa dan sarana prasarana dan laporkan kepada kami”.

Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan karena didalamnya terdapat proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, memberikan petunjuk secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya. (Koswara 2005). “Monitoring merupakan bagian dari proses pemantauan sekolah yang bertujuan untuk membina, membantu sekolah, membantu guru-guru dan kepala sekolah. Dalam melakukan monitoring, biasanya pengawas memantau perangkat pembelajaran (silabus, RPP,dll), memantau guru melakukan pembelajaran yang baik. Selain itu pengawas juga memonitoring manajemen sekolah. yang dimonitoring dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan ketercapaian 8 standar pendidikan nasional. Dalam hal ini kami memonitoring bagaimana kepala sekolah melakukan manajemen sekolah agar sekolah itu menjadi sekolah yang bermutu”.

Monitoring sangat berperan penting dalam membantu guru dalam hal pembelajaran baik itu dalam hal perangkat pembelajarannya maupun metode yang digunakan. Dengan memonitoring perangkat pembelajaran maka pengawas serta guru dapat mengetahui pentingnya perangkat pembelajaran dalam menunjang proses belajar

mengajar. Monitoring yang digunakan juga, guru dapat mengetahui seberapa baiknya metode yang digunakan untuk mengajar. Artinya bahwa monitoring dilakukan agar dapat sedini mungkin mengubah apa yang memang harus diubah sehingga meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Dan agar proses atau kegiatan yang sedang berjalan, dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, monitoring tidak bisa dilakukan hanya sekali saja atau dua kali saja, untuk menghasilkan kualitas mutu pendidikan agar dapat menghasilkan output yang berkaualitas dari sebelumnya, maka kegiatan monitoring harus dilakukan secara terus menerus agar menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Kegiatan monitoring dilakukan oleh pengawas selain terhadap pelaksanaan pembelajaran, juga pada pelaksanaan penerimaan siswa baru, juga pada persiapan ujian nasional serta juga sarana dan prasarana. Monitoring yang dilakukan pada penerimaan peserta didik baru adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan penerimaan peserta didik baru yang dilakukan, juga monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Pelaksanaan monitoring yang dimaksudkan disini adalah terhadap pelaksanaan kegiatan yang terjadi di sekolah. Dalam melakukan monitoring, pengawas memiliki tugas yang dapat membuat guru mengevaluasi dan mengubah cara mengajar mereka.(Dedi Iskandar 2016). Artinya bahwa saat pengawas menemukan adanya kesalahan guru saat mengajar maka pengawas tersebut dapat membantu guru dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Lebih lanjut, (Dedi Iskandar 2016) mengatakan bahwa tugas pengawas merupakan tugas yang mulia karena bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu kunjungan pengawas terhadap sekolah yang ada seharusnya dilakukan dengan teratur dan merata.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke memiliki tiga cara dalam melakukan monitoring terhadap setiap sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Merauke. Cara-cara tersebut antara lain: laporan bulanan, turun langsung ke sekolah, dan melalui pengawas. Monitoring dengan turun langsung ke sekolah yang dilakukan oleh dinas adalah setahun sekali dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas adalah sebulan sekali namun yang terjadi kadang tidak menentu. Untuk sekolah yang ada di kota, kegiatan monitoring bisa dilakukan lebih dari sekali dalam sebulan. Misalnya pada kegiatan-kegiatan tertentu, contohnya pada kegiatan penerimaan siswa baru, pengawas kadang melakukan monitoring lebih dari sekali dalam sehari. Itu adalah kegiatan monitoring yang dilakukan pada sekolah yang ada di kota berbeda dengan sekolah yang ada di pinggiran dan pelosok. "Monitoring yang kita lakukan memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa sama pengawasan yang kita berikan antara sekolah yang ada di kota dengan yang ada di pinggiran dan pelosok. Keterbatasan kita dalam melakukan monitoring itu adalah biaya. Sehingga kalau ketersediaan biaya maka kita akan lakukan monitoring. Selama ini monitoring yang kami lakukan 1 tahun sekali karena kami merasa sudah ada laporan bulanan dan pengawas. Laporan bulanan efektif dan dilakukan oleh semua sekolah. Sekarang juga dinas lebih mempermudah dengan menyarankan sekolah mengirimkan laporan bulanan lewat email. Namun jika

dilihat untuk saat sekarang ini, monitoring yang dilakukan dapat dikatakan belum memenuhi harapan terhadap mutu pendidikan, kondisi sekolah kita antar sekolah yang ada di kota, pinggiran dan di pelosok sangat jauh berbeda. Kalau gurunya semuanya oke, sarpras oke, pasti bagus. Tetapi di beberapa tempat seperti Imama, Tubang, Buti pengawasan yang dilakukan disana belum seperti di kota. Tetapi kami tetap optimis karena kami tetap berjalan terus”.

Untuk pelaksanaan monitoring pada sekolah yang ada di pinggiran, pengawas biasanya ke sekolah sebulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan namun kadang juga bisa 3 bulan sekali pengawas melakukan monitoring. Sedangkan untuk sekolah yang ada di pelosok, pengawas melakukan monitoring tergantung dari dana yang ada. Walaupun jadwalnya ditetapkan sebulan sekali namun kalau tidak ada dana maka pengawas tidak bisa turun monitoring. Bahkan ada sekolah yang di pelosok yang sangat jarang tersentuh akan monitoring dari pengawas. Menurut (Syarifah Rahmah 2018), beban kerja pengawas dalam melakukan tugasnya adalah 37,50 jam per minggu. Hal ini berarti berdasarkan temuan di lapangan, pengawas belum memenuhi jam kerja.

Yang dilihat oleh pengawas saat melakukan monitoring adalah kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Saat melakukan monitoring dalam kelas, yang dilihat adalah bagaimana guru mengajar dalam kelas. Apakah sudah terstruktur atau belum. Yang ditemui adalah kadang ada guru yang mengajar tidak mengikuti RPP yang dibuatnya. Misalnya dalam RPP guru memberi salam saat masuk kelas tetapi yang terjadi adalah guru tidak memberi salam. Bahkan saat monitoring, ada guru yang tidak bisa mengoperasikan *infocus*. Selain monitoring terhadap kegiatan belajar mengajar, pengawas juga melakukan monitoring terhadap sarana prasarana sekolah, administrasi sekolah, pelaksanaan ujian sekolah. Hal ini senada dengan yang disampaikan (Dedi Iskandar 2016) bahwa seorang pengawas harus benar-benar memahami peranannya dalam memberikan layanan kepada kepala sekolah, guru, maupun staf yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah, guru dan staf. Monitoring tidak hanya dilakukan dengan cara turun langsung ke sekolah tetapi juga melalui internet, yaitu dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*. Kualitas monitoring yang dilakukan menurut pihak sekolah sudah berkualitas sedangkan oleh pengawas sendiri mereka mengatakan belum berkualitas apalagi memenuhi harapan terhadap mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan monitoring yang dilakukan pengawas belum merata pada semua sekolah yang ada di Kabupaten Merauke. Tidak meratanya kegiatan monitoring yang dilakukan disebabkan oleh kurangnya biaya/dana. Kadang walaupun tidak ada dana namun monitoring harus dilakukan, mereka harus menggunakan uang sendiri. Selain kurangnya dana, juga kondisi geografis yang menantang

Dilihat dari luas cakupan geografis Merauke maka secara keseluruhan kalau boleh jujur pekerjaan pengawas dalam melakukan monitoring belum maksimal. Artinya ada standar maksimal minimal yang dilakukan pengawas dalam monitoring misalnya dalam 1 bulan minimal monitoring ke sekolah 3 kali. Dengan melihat pengawas SMP

berjumlah 7 orang. Kalau dilihat dari aspek tersebut sehingga untuk sekolah yang berada di dalam kota kemudian sekolah pinggiran, misalnya kawasan distrik Semangga, Kurik, Animha itu harapan untuk monitoring sudah hampir mencukupi. Tetapi untuk distrik yang jauh yang ada di daerah 3T seperti distrik Waan, Kimaam, Kaptel, Tubang, Ngguti, Okaba, kunjungan pengawas ke sekolah tersebut belum memenuhi harapan. Hal ini terjadi karena kondisi geografis, jumlah pengawas itu sendiri, keterbatasan biaya operasional, sampai kepada persoalan masalah cuaca dan lainnya. Namun kalau kita sudah melakukan monitoring terhadap akademik dan manajerial berarti tugas pokoknya sudah terpenuhi dalam artian kalau kita monitoring 8 standar. Monitoring yang dilakukan oleh dinas sendiri dalam hal ini adalah kepala dinas dan jajarannya adalah setahun sekali dan mereka sudah monitoring ke daerah pelosok seperti pada SMP yang berada di Tuban, Ngguti namun belumlah maksimal sedangkan untuk pelaksanaan monitoring pada daerah pelosok oleh pengawas sendiri belum sampai ke sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan pada kondisi geografis Merauke, jumlah pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah sekolah serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan”.

Ketimpangan antara pengawas dan banyaknya sekolah yang tersebar di kota Merauke dan sekitarnya juga merupakan salah satu masalah yang terjadi di lapangan. Hal ini tentunya menjadi problem oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Berdasarkan data yang diperoleh saat ini jumlah sekolah SMP yang ada di Kabupaten Merauke berjumlah 62 sekolah tidak sebanding dengan tenaga pengawas yang tersedia pada dinas. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam rangka meningkatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun dalam hal meningkatkan manajemen atau pengelolaan sekolah. Dengan tidak sebandingnya jumlah sekolah yang ada dan ketersediaan pengawas yang terbatas membuat jangkauan pengawas untuk melakukan monitoring menjadi berkurang. Idealnya, seorang pengawas memiliki sekolah binaan sebanyak tiga sampai empat sekolah saja. Namun temuan yang didapatkan di lapangan, sekolah yang dibawah oleh seorang pengawas adalah delapan sekolah bahkan ada pengawas yang memiliki sembilan sekolah binaan. Hal ini berdampak pada mutu pendidikan sekolah baik itu sistem belajar mengajar maupun pengelolaan sekolah. Sumber daya pendidikan yang tidak terjamin dapat berdampak juga terhadap peningkatan mutu pendidikan. sumber daya pendidikan menurut (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0668/U/1089 tentang Manajemen Terpadu Sumber Daya Pendidikan n.d.) adalah (1) ketenagaan, (2) dana, (3) sarana dan prasarana.

Sekolah yang jarang dimonitoring akan mengalami penurunan mutu pendidikan dikarenakan saat melakukan aktifitas belajar mengajar maupun pengelolaan sekolah tidak ada yang memantau dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki sedangkan sekolah yang sering dimonitoring mengalami peningkatan mutu pendidikan karena dengan dilakukannya monitoring yang teratur dari pengawas, sekolah dapat terus memperbaiki kinerja baik itu dalam hal akademik maupun

manajerial. Namun dikatakan bahwa saat monitoring, selalu melihat 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. 8 standar ini digunakan pengawas untuk melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi dalam rangka memberikan masukan untuk memperbaiki aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan akan terasa manfaatnya jika pihak yang dimonitoring dalam hal ini adalah sekolah dapat menerima dan melakukan masukan atau saran dari pengawas.

Supervisi

Supervisi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk membina sekolah dalam hal ini untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan kemampuan dalam pencapaian terhadap tujuan sekolah. Adapun indikator yang digunakan sebagai pertanyaan berkaitan dengan supervisi adalah: pelaksanaan supervisi terhadap komponen sistem pendidikan. "Berbicara mengenai supervisi maka kita pengawas melakukan 2 supervisi yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi akademik berarti kita mensupervisi guru. Kita supervisi mulai dari guru membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai kepada evaluasi pembelajaran. Saat kita mensupervisi guru, bagaimana kita melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya kita melihat persentase guru mengajar dilengkapi oleh perangkat pembelajaran yang lengkap. apakah silabusnya ada, sudah sesuaikah guru mengajar atau tidak, apakah sudah ada RPP yang benar-benar hasil buatan guru itu sendiri. Supervisi pendidikan adalah serangkaian bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan proses belajar mengajar. (Imron 1995). Supervisi pendidikan adalah sebagai pemberian pelayanan dan bantuan guna meningkatkan kualitas pendidikan. (Sahertian 2000). Artinya bahwa bantuan yang dimaksudkan disini adalah bantuan yang bertujuan dan mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang memberikan bantuan adalah supervisor. Bantuan ini bukan hanya pada guru saja namun juga ke kepala sekolah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 2, pasal 2, ayat 1, 8 standar nasional pendidikan yang disupervisi meliputi (1), standar isi, (2) standar proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, (8) penilaian pendidikan. Saat pengawas melakukan supervisi terhadap 8 standar tersebut maka pengawas sudah melakukan baik supervisi akademik maupun manajerial.

Supervisi akan menjadi bermutu jika adanya kerja sama yang baik antara setiap komponen yang ada. Hal ini ditegaskan oleh (Dedi Iskandar 2016) bahwa, mutu pendidikan tidak akan dicapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Hal ini berarti apapun yang dilakukan oleh pengawas, akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh guru, kepala sekolah, TU, dan tenaga kependidikan yang lain. Karena dari hasil

supervisi kadang ditemukan ada guru yang mengajar dengan silabus dan RPP yang bukan hasil buatannya sendiri tetapi merupakan hasil copy paste dari punya orang lain. Masih juga ditemukan ada guru yang menggunakan RPP yang dijual secara online Padahal idealnya, perangkat pembelajaran baik silabus maupun RPP merupakan hasil buatan guru itu sendiri. Kemudian ditemukan juga ada guru yang mengajar sama sekali tidak menggunakan RPP dan silabus. Mereka hanya berpatokan kepada buku paket maka tugas pengawas perlu memberikan saran dan masukan agar para guru mematuhi semua aturan yang ada. Supervisi Akademik melakukan pemeriksaan terhadap RPPnya, cara mengajarnya di depan kelas, metode apa yang digunakan. Kalau supervisi manajerial kita lakukan pada kepala sekolah. jadi di sana kita lihat mutu gurunya seperti apa, administrasinya seperti apa.

Dalam melakukan supervisi akademik, pengawas mensupervisi guru, meliputi: guru membuat perencanaan pembelajaran, bagaimana guru dalam pelaksanaan pembelajaran, sampai kepada guru mengevaluasi pembelajaran. Kadang dalam melakukan supervisi, ada guru yang mengajarnya tidak dilengkapi dengan RPP atau RPPnya ada tetapi merupakan hasil beli padahal idealnya adalah RPP merupakan hasil buatan sendiri. Ada juga guru yang mengajar tidak sesuai dengan isi RPPnya. Disinilah peran pengawas. Pengawas membantu dan membimbing guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Barr (Dedi Iskandar 2016) bahwa pengawas harus memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi pengajaran dan untuk menemukan penyebab kemungkinan pekerjaan yang buruk dengan tingkat keahlian tertentu, harus memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai perangkat. Pengawas harus memproses keterampilan konstruktif tertentu untuk metode serta bahan-bahan pengajaran dan juga memiliki kemampuan melihat bagaimana cara guru mengajar. Supervisi manajerial, pengawas melakukan supervisi terhadap kepala sekolah tentang bagaimana pengelolaan sekolah misalnya dalam hal ini pengawas melihat visi dan misi sekolah. Apakah visi misinya dipajang dan dapat diakses oleh seluruh warga sekolah, atau pengawas melihat kinerja kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bersosialisasi, apakah kepala sekolah memberikan informasi atau motivasi kepada guru maupun staf, dan lain-lain.

Dalam melakukan supervisi, maka dapat dilihat bahwa supervisi yang dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan guru tetapi lebih kepada membantu guru dalam meningkatkan kualitas sehingga kualitas pembelajarannya dapat tercapai. Dalam supervisi akademik, pengawas mensupervisi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Misalnya supervisi akademik yang dilakukan terhadap perangkat pembelajaran (RPP). Karena jika guru yang berkualitas maka pembelajaran yang dilakukan juga berkualitas. Selain RPP, guru dalam mengajar juga tidak hanya mengandalkan perangkat pembelajaran yang ada karena belum tentu perangkat pembelajaran lengkap semua dengan ini maka perlu adanya kreatifitas dari guru. Oleh karena itu pengawas diangkat dengan memiliki latar belakang sebagai guru khususnya guru mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu guru-guru

mata pelajaran pada sekolah-sekolah yang ada.

Sejatinya bahwa, saat melakukan supervisi terhadap 8 SNP maka semua aspek baik akademik maupun manajerial sudah dilakukan. 8 SNP tersebut antara lain: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Hal ini ditegaskan dengan pendapat (Syarifah Rahmah 2018) bahwa supervisi manajerial lebih merujuk kepada memberikan pembinaan serta bimbingan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas juga menggunakan teknik non supervisi kelas. Untuk pelaksanaan non supervisi kelas, pengawas memberikan tanggung jawab supervisi ke kepala sekolah. Artinya bahwa kepala sekolah yang melakukan supervisi akademik; mensupervisi kelas, perangkat pembelajaran berupa RPP, silabus, daftar nilai, dan lain-lain, dan cara mengajar guru. Nantinya laporan supervisi kepala sekolah diserahkan kepada pengawas. “Dalam melakukan supervisi akademik saya melihat guru mata pelajaran dalam melaksanakan tupoksinya yaitu merencanakan, melaksanakan sampai kepada evaluasi. Kalau saya kebetulan mengajar mata pelajaran IPA namun para guru memiliki kadangkala yaitu laboratorium. Sebagian besar sekolah belum memiliki laboratorium sehingga dalam hal mata pelajaran yang membutuhkan praktek tentu tidak bisa dilakukan tidak dibarengi dengan peralatan yang lengkap. Kalau begitu kita bisa memberi masukan kepada guru untuk melakukan pembelajaran yang ada prakteknya bisa dilakukan tanpa harus di laboratorium dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi guru tidak tergantung saja pada apa yang ada tetapi dapat berkreasi sedapat mungkin asalkan sesuai dengan pelajarannya. Jadi pelajaran yang sebenarnya susah oleh guru dijadikan sederhana sehingga lebih mudah dimengerti”.

Non supervisi, pengawas tidak melakukan tatap muka dengan siswa atau ke kelas-kelas namun lebih kepada memeriksa, membantu mengoreksi, berdiskusi atau FGD. Hal ini ditegaskan oleh (Ara Hidayat 2012) bahwa supervisi juga terdiri dari non supervisi kelas dan supervisi kelas. Non supervisi kelas berarti pengawas sekolah tidak turun ke kelas, hanya sebatas dengan kepala sekolah. kemudian kembali dipertegas lagi dengan Permendikbud No 15 tahun 2018 pasal 9 bahwa salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi pada guru dan tenaga kependidikan. Ritme pelaksanaan supervisi antara sekolah yang ada di kota dan pinggiran serta di pelosok tidaklah sama. Sekolah yang berada di kota supervisinya berjalan dengan sangat baik. Sedangkan yang di pinggiran dan pelosok tidak begitu baik. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang menantang serta transportasi yang sangat sulit juga anggaran yang disediakan pemerintah terbatas.

Agar supervisi menjadi berkualitas, maka perlu adanya kerja sama yang baik antara pengawas dan warga sekolah. namun pada beberapa sekolah, kerja sama yang diharapkan kurang. Misalnya pada pengisian data-data sekolah, sekolah tersebut mengisinya dengan tidak sesuai fakta yang ada. Pada sarana prasarana diberi bintang 3

tetapi kenyataannya sekolah kekurangan sarana prasarana. Hal ini dilakukan agar sekolah terlihat baik dan sempurna di mata pemerintah pusat tetapi sekolah tidak menyadari bahwa hal itu merugikan sekolah itu sendiri. Pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada sekolah karena dianggap bahwa sudah baik. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Dan Pengawas, dikatakan bahwa agar tugas guru dan pengawas dapat direalisasikan dengan baik maka perlu adanya pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Supervisi akademik lebih kepada guru, pengawas melihat metode guru mengajar, membantu guru mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Misalnya pada pelajaran IPA yang harus melakukan percobaan tetapi sekolah tidak memiliki sarana yang memadai, guru dapat membuat pelajaran menjadi sederhana dengan menggunakan pendekatan proyek yang mana dilihat berdasarkan kondisi alam disekitar. Sedangkan supervisi manajerial, pengawas melihat kepala sekolah. Bagaimana pengawas dan kepala sekolah melihat pengelolaan sekolah, hal-hal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 8 SNP untuk kedepannya dapat meningkatkan akreditasi sekolah. Supervisi yang dilakukan akan menjadi bermanfaat jika pihak sekolah dan pengawas saling bekerja sama. Pengawas saat memberikan masukan, sekolah meresponnya dengan baik dan mau melakukan apa yang disampaikan. Juga sekolah tidak menutupi hal-hal yang seharusnya tidak ditutup-tutupi seperti pada kecurangan saat melakukan pengisian data. Dengan pelaksanaan supervisi, sekolah merasa tidak sendirian tetapi dengan hadirnya pengawas, sekolah memiliki teman sekaligus orang tua yang dapat membimbing dan mengarahkan menuju ke arah peningkatan kualitas mutu pendidikan. Namun, mutu peningkatan pendidikan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pengawas, tetapi perlu adanya kerja sama antara pengawas, kepala sekolah, guru bahkan orang tua.

Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu tindakan mengukur kegiatan yang dilakukan apakah sudah memenuhi harapan atau target yang ingin dicapai atau belum. Jadi evaluasi yang dilakukan pada dunia pendidikan berarti elemen-elemen yang memiliki tugas mengevaluasi memberikan penilaian terhadap kegiatan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini adalah sekolah sehingga dapat mengetahui hasil serta mutu dari sekolah yang ada. Elemen yang dimaksud disini adalah kepala dinas sebagai puncak pimpinan dalam dunia pendidikan di suatu daerah, evaluasi juga dilakukan oleh pengawas sekolah dan juga oleh sekolah itu sendiri. Jadi indikator yang dijadikan pertanyaan mengenai evaluasi adalah: pelaksanaan evaluasi serta dampak dari kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi.

“Evaluasi yang dilakukan oleh dinas adalah untuk pertanggungjawaban dari semua proses yang dilakukan oleh sekolah. Mulai dari pertanggungjawaban dana-dana sekolah, administrasi dan laporan bulanan sampai ke konteks bagaimana sekolah menata guru dalam melaksanakan implementasi di sekolah. Misalnya guru dalam setiap bidang studi harus lengkap. Jika jumlah guru belum memenuhi jumlah bidang studi,

dari evaluasi ini kita mencari solusinya. Saat kita mengevaluasi hasil monitoring dan supervisi, kita tahu bahwa di setiap sekolah itu guru ada berapa. Misalnya guru mata pelajaran atau guru bidang studi di sekolah kurang berapa. Kita bisa kasih atau misalnya kita lihat guru matematika lebih pada sebuah sekolah dan di sana kekurangan jam mengajar, kita bisa pindahkan sambil menunggu sampai ada penerimaan. Sedangkan saat kita mengevaluasi sarpras, kita lihat ada yang kurang, toilet misalnya, kita bisa bangun. Kalau memang ada tetapi sudah rusak, kita bisa rehab. Sedangkan kalau ada yang sudah dibuat kemudian rusak akibat perawatan dari sekolah yang tidak baik, maka kita akan melihatnya nanti karena masih banyak sekolah yang membutuhkan toilet juga. Jadi kita memberikan sesuai dengan seberapa besar sekolah tersebut membutuhkan. Kalau memang harus diberikan dan tidak bisa ditunda kita langsung berikan. Evaluasi yang dilakukan oleh dinas kebanyakan dari hasil laporan pengawas. Misalnya kita laporkan kurangnya sarpras. Contohnya, toilet, alat kesenian, maupun ketersediaan buku. Nah, kita buat laporan kemudian kita serahkan ke dinas. nanti tindak lanjutnya ada di tangan dinas”. Monitoring, supervisi dan evaluasi, juga dilakukan oleh LPMPD (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah) juga melakukannya. Jadi hasil monitoring dan supervisi kami laporkan ke LPMPD”.

Evaluasi merupakan suatu tindakan ataupun kegiatan penentuan nilai pada suatu kegiatan. (Qori Khairunisha 2019). Jadi evaluasi pendidikan berarti memberikan penilaian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan atau yang terjadi di lingkungan pendidikan sehingga dapat diketahui mutu serta hasilnya dan dari hasil evaluasi tersebut dapat diambil sebuah kebijakan atau keputusan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, evaluasi telah dilakukan pada semua komponen pendidikan yang ada di sekolah. Evaluasi yang dilakukan oleh dinas lebih banyak adalah dari hasil laporan pengawas. Misalnya evaluasi berdasarkan laporan mengenai sarana prasarana dan tenaga pendidik. Dinas akan melihat dan menjawab permintaan atau keluhan sekolah berdasarkan kebutuhan. Seperti yang terjadi pada 2 sekolah yang berbeda, yaitu pada SMP Gudang Arang dan SMP Yohanes Aert. Kedua sekolah ini mengeluhkan masalah yang sama tetapi ada yang dijawab sedangkan ada yang belum dijawab. Selain dinas, pengawas juga melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh pengawas adalah pada saat setelah melakukan monitoring dan supervisi. Artinya bahwa, pada hari yang sama, pengawas bisa melakukan monitoring dan supervisi serta evaluasi sekaligus. Evaluasi dilakukan di sekolah bersama-sama dengan kepala sekolah dan para guru. Pengevaluasian yang dilakukan oleh dinas mencakup semua komponen pendidikan. Mulai dari dana sekolah, administrasi, guru, sarpras. Untuk masalah yang sering terjadi yaitu kekurangan guru dan tenaga tata usaha oleh karena itu dinas siap mengadakannya yang mana didominasi oleh tenaga honorer yang meliputi guru honorer dan pegawai tata usaha honorer. Juga untuk sarpras, dinas memberikan sesuai skala kebutuhan. Sekolah yang benar-benar membutuhkan, itu yang diutamakan.

Jadi kami setiap melakukan monitoring dan supervisi, dan evaluasi kepada guru-

guru dalam satu ruangan kemudian kita evaluasi bersama. Kami juga melakukan evaluasi berdasarkan 8 (delapan) standar tersebut. Jika ada kesalahan yang ditemukan kami minta untuk diperbaiki begitu juga terhadap hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik kami sarankan ditingkatkan lagi. Namun, walaupun kami sudah melakukan semuanya tetapi semuanya tergantung pada sekolah tersebut, pengawas membantu sekolah dengan memberikan pendampingan pada sekolah-sekolah mengevaluasi dirinya. Evaluasi sekolah dilakukan dengan mengisi kuesioner secara online. Hasil dari evaluasi diri sekolah atau pemetaan mutu tersebut nantinya akan keluar sebagai rapor mutu. Melalui rapor mutu, sekolah dapat melihat dirinya, apakah masih berada dibawah standar atau sudah memenuhi standar yang ada. Selain itu juga setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dampak. Terlepas dari apakah dampak tersebut baik atau malah sebaliknya. Begitu juga dengan monitoring, supervisi dan evaluasi. Dampak dari kegiatan ini juga dirasakan oleh sekolah”.

Jadi jika ada temuan-temuan saat melakukan supervisi atau monitoring maka akan dibahas pada saat evaluasi. Apapun itu temuannya. Misalnya ditemui ada kesalahan saat guru mengajar. Apa yang seharusnya dilakukan malah tidak dilakukan, pada saat evaluasi maka guru tersebut diminta untuk perbaiki. Hal ini ditegaskan dengan pendapat dari (Dedi Iskandar 2016) bahwa pengawas yang bermutu adalah pengawas yang dapat memberikan bantuan peningkatan mutu pembelajaran bagi guru. Artinya bahwa pengawas dalam melakukan tugasnya membantu guru yang dari tidak bisa menjadi bisa. Lebih lanjut, (Dedi Iskandar 2016) mengatakan bahwa mutu pengawasan akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan murid yang bermutu dan pada akhirnya jika semua bersinergi akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.

Pengawas juga membantu para guru dalam mengevaluasi diri sekolah (EDS). Evaluasi ini biasa juga disebut dengan pemetaan mutu pendidikan dimana sekolah akan menilai dirinya sendiri dan hasil akhir dari EDS ini akan keluar sebagai rapor mutu sekolah. Dengan rapor mutu ini, dapat dilihat standar sekolah mengalami peningkatan atau penurunan, dalam arti bahwa sekolah tersebut masih dibawah standar yang ditentukan atau sudah memenuhi standar. Hal ini ditegaskan oleh (Fitri Ning Tyas 2014) bahwa pelaksanaan EDS bukan saja merupakan tanggung jawab kepala sekolah namun juga pengawas sekolah yang mana karena pengawas sekolah bertugas membina dan membimbing sekolah.

Pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas berdampak positif bagi sekolah. Dampaknya terhadap guru adalah guru menjadi semakin bertanggung jawab, akreditasi sekolah yang dulunya kurang baik mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, manajemen sekolah juga menjadi baik dan bukan hanya itu, sekolah juga merasa ada yang menemani dan mengayomi. Mengenai pelaksanaan evaluasi yang dilakukan serta dampaknya maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh dinas lebih banyak merupakan hasil laporan yang

diberikan pengawas. Untuk keluhan-keluhan yang disampaikan oleh sekolah, dinas akan memberikannya sesuai dengan skala kebutuhan. Jika hal tersebut memang benar-benar dibutuhkan dan tidak bisa ditunda maka keluhannya akan didengar dan dijawab. Sedangkan permintaan atau keluhan yang masih bisa ditunda maka pengadaannya nanti. Pelaksanaan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pengawas sekolah namun juga oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu pendidikan). hal ini ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 96 ayat 1 bahwa : LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam upaya melakukan penjaminan mutu pendidikan Evaluasi yang dilakukan oleh pengawas pada sekolah adalah evaluasi pada 8 Standar Nasional Pendidikan. Jika ditemui ada kekurangan maka pengawas menyarankan untuk diperbaiki sedangkan untuk hal-hal yang pelaksanaannya sudah baik maka ditingkatkan lagi. Dari pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan maka berdampak pada semua aspek dalam sekolah. Misalnya guru menjadi semakin bertanggung jawab, pelaksanaan, akreditasi sekolah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Juga sekolah merasa tidak sendirian tetapi ada yang mendampingi dan mengarahkan.

Kemudian dipertegas lagi pada pasal 1 ayat 24 bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi yang dilakukan juga membantu sekolah dalam mengenali kesalahan-kesalahannya sehingga dapat memperbaiki untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam rangka memenuhi harapan terhadap mutu pendidikan. Dengan kehadiran pengawas, sekolah merasa ada sosok orang tua yang menemani mereka sehingga sekolah tidak merasa sendirian, kerjasama pengawas dan guru juga menghasilkan kemajuan pada sekolah tersebut, yang mana akreditasinya menjadi lebih baik, guru-guru menjadi bertanggung jawab, pengelolaan sekolah menjadi lebih baik dari sebelumnya serta sarana pendukung yang dulunya tidak ada, namun karena adanya kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan sehingga sarana pendukung yang dibutuhkan sekolah akhirnya dapat digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke belum maksimal. Dari semua Sekolah Menengah Pertama yang ada hanya beberapa sekolah saja yang merasakan dampak pelaksanaan pengawasan. Hal ini diakibatkan karena sumber daya manusia yakni pengawas sekolah yang tersedia di dinas tidak seimbang dengan jumlah sekolah yang ada sehingga berpengaruh terhadap jangkauan pengawas ke sekolah binaan menjadi berkurang dan tidak merata. Kunjungan

pengawas lebih intens dilakukan pada sekolah yang ada di kota sedangkan sekolah yang berada di pinggiran dan pelosok kunjungan hanya dilakukan tiga bulan sekali bahkan terdapat sekolah yang sangat jarang dilakukan pengawasan. Padahal dengan kunjungan pengawas yang teratur dapat membantu sekolah dalam melihat kekurangan sekolah untuk segera diperbaiki. Hal lain yang membuat pelaksanaan pengawasan belum maksimal adalah karena kekurangan dana. Untuk melakukan pengawasan pada sekolah yang jauh, pengawas kadang menggunakan uang pribadi karena dana supervisi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Selain itu, kondisi geografis yang menantang juga membuat pengawas sulit mengunjungi sekolah.

Mengacu pada hasil kesimpulan di atas maka sebagai saran Perlu adanya penambahan jumlah pengawas. Karena jika jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah pengawas maka kemampuan seorang pengawas untuk mengawasi banyak sekolah menjadi berkurang. Pemerintah dapat mengalokasikan dana supervisi lebih banyak dari sebelumnya karena dana yang ada tidak mencukupi untuk pengawas melakukan pengawasan pada semua sekolah yang ada apalagi ditambah dengan sekolah-sekolah yang di pelosok yang mana sekolah-sekolah tersebut sulit untuk dijangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Hidayat, I. M. (2012). *Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mmengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Arikunto. (1986). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron, A. (1995). *Pembinaan Guru Di Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sahertian. (2000). *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dedi Iskandar, U. B. W. (2016). Peran Pengawas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9(2), 179–195.
- Fitri Ning Tyas, D. N. (2014). Penerapan Program Evaluasi Diri Sekolah (EDS) (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Gresik). 3(3), 11.
- Koswara, D. (2005). Implikasi Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 3(1).
- Ngilamele, F. I. (2016). Fungsi Pengawasann Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pengadilan Negeri Merauke). *Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Universitas Musamus Merauke*.
- Qori Khairunisha. (2019). *Kualitas Pengawasan Pendidikan Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara*. Universitas Negeri Padang.
- Raharjo, S. B. (2012). *Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia*. *Jurnal*

- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 16(2), 1–22. <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>
- Rodiyah, K. (2014). Kualitas Pelayanan Administrasi Pendidikan Di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. 2(2), 1–14.
- Syarifah Rahmah. (2018). Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan. 25(2).
- Welhelmina Jeujan, Y. E. T. (2013). Implementasi Program Supervisi Pendidikan (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Distrik Merauke). 136–152.
- Zainal, M. (n.d.). E-Supervision Melalui Penggunaan Virtual Community Di Sosial Media. 1–15.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0668/U/1089 tentang Manajemen Terpadu Sumber Daya Pendidikan. (n.d.).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. (n.d.)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Guru Dan Pengawas. (n.d.).
- Surat Keputusan Menpan Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Kelembagaan.Ristedikti, 1–33.
- BPS Kabupaten Merauke. (2017). Kabupaten Merauke Dalam Angka 2017.